



MODUL PELATIHAN POLICY BRIEF



Oleh :

**Laboratorium
Governance dan Public Policy
STISIPOL CANDRADIMUKA**



Hak Cipta © pada:

Laboratorium Governance dan Public Policy STISIPOL Candradimuka

Edisi Tahun 2025

Jl. Swadaya Sekip Ujung Palembang

Modul Pelatihan *Policy brief* untuk Mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Mahasiswa S2 Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik

TIM PENGARAH SUBSTANSI:

Dr. Lisdiana, M.Si

Dr. Arif Rahman Hakim, M.Si

Dr. Femi Asteriniah, M.Si

Dr. Nopriawan Mahriadi, M.Sc

Dr. Deby Chintia Hestiriniah, M.Si

PENULIS MODUL:

Laboratorium Governance dan Public Policy

EDITOR: Dr. Deby Chintia Hestiriniah, M.Si



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Modul Pelatihan *Policy brief* ini dapat diselesaikan dengan baik. Modul ini disusun oleh Laboratorium Governance dan Public Policy sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara dan pemangku kepentingan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Dalam dinamika tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks, kebutuhan akan dokumen kebijakan yang ringkas, padat, dan tepat sasaran menjadi sangat krusial. *Policy brief* hadir sebagai jembatan antara hasil analisis akademis atau teknis dengan pengambilan keputusan strategis oleh para pemimpin. Modul ini dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman konseptual hingga keterampilan teknis dalam menyusun *Policy brief* yang efektif.

Kami menyadari bahwa modul ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan modul ini di masa mendatang. Semoga modul ini dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas kebijakan publik di Indonesia.

Palembang, 31 Maret 2025

Laboratorium *Governance* dan *Public
Policy*



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. HASIL BELAJAR.....	4
C. MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK.....	4
BAB II	5
LANDASAN KONSEPTUAL DAN STRATEGI <i>POLICY BRIEF</i>	5
A. PENDAHULUAN.....	5
B. KONSEP DAN JENIS <i>POLICY BRIEF</i>	6
C. KEGIATAN PENYUSUNAN <i>POLICY BRIEF</i>	10
BAB III	17
PEMBUATAN <i>POLICY BRIEF</i>	17
A. PENDAHULUAN.....	17
B. STRUKTUR PENULISAN <i>POLICY BRIEF</i>	17
REFERENSI.....	26



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Siklus Kebijakan Publik dan Posisi <i>Policy brief</i>	2
Gambar 1. 2 Siklus Proses Pembuatan Kebijakan	6
Gambar 1. 3 Komponen Utama <i>Policy brief</i>	10
Gambar 1. 4 Struktur Penulisan <i>Policy brief</i>	18



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam ekosistem pemerintahan modern, pengambilan keputusan tidak lagi dapat hanya mengandalkan intuisi atau pengalaman masa lalu semata. Tuntutan terhadap akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas publik memaksa para pembuat kebijakan untuk berlandaskan pada data dan analisis yang kuat. Namun, seringkali terdapat kesenjangan (*gap*) yang lebar antara produsen pengetahuan (peneliti, analis kebijakan, akademisi) dengan konsumen pengetahuan (pejabat pembuat keputusan, politisi, eksekutif).

Kesenjangan ini seringkali disebabkan oleh perbedaan bahasa, format, dan urgensi. Hasil penelitian atau analisis kebijakan yang komprehensif seringkali terlalu tebal, teknis, dan memakan waktu lama untuk dibaca oleh para pemimpin yang memiliki keterbatasan waktu. Di sinilah *Policy brief* memegang peranan vital. *Policy brief* adalah dokumen ringkas yang menyajikan inti dari analisis kebijakan yang kompleks ke dalam format yang mudah dicerna, dengan fokus pada rekomendasi tindakan yang konkret.

Laboratorium Governance dan Public Policy menyadari bahwa kompetensi dalam menyusun *Policy brief* adalah keterampilan dasar (*core competency*) yang harus dimiliki oleh analis kebijakan maupun pemimpin organisasi publik. Sayangnya, banyak dokumen rekomendasi kebijakan yang beredar masih bersifat normatif, kurang berbasis bukti, atau tidak menyertakan opsi solusi yang jelas.

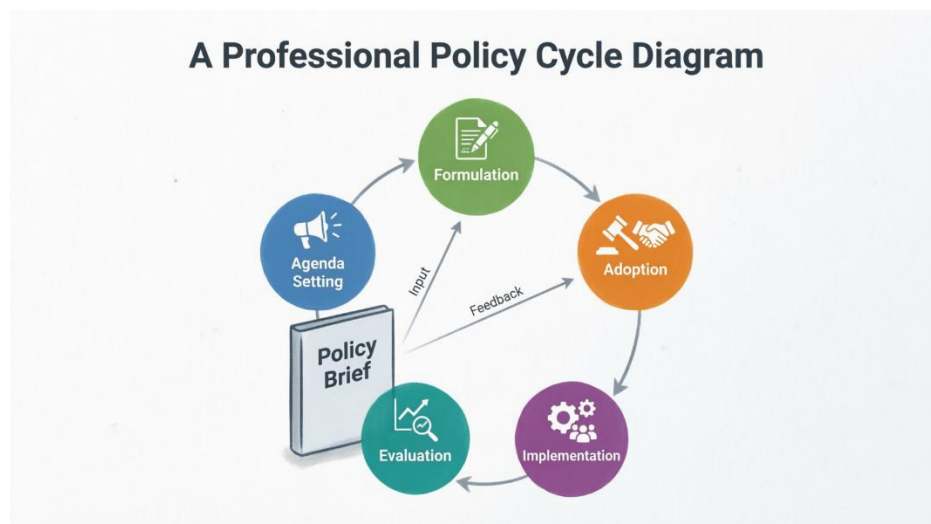
Melalui modul pelatihan ini, Laboratorium Governance dan Public Policy berupaya membakukan standar penyusunan *Policy brief* yang berkualitas. Modul ini dirancang untuk menjembatani teori analisis kebijakan dengan praktik penulisan strategis. Dengan menguasai keterampilan ini, diharapkan output kebijakan yang dihasilkan oleh instansi pemerintah maupun organisasi publik dapat lebih tepat sasaran, implementatif, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Pentingnya *Policy brief* juga semakin mendesak dalam konteks reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. Dokumen yang ringkas namun berbobot akan mempercepat proses deliberasi kebijakan dan mengurangi hambatan birokrasi dalam tahap persiapan regulasi. Oleh karena itu, pelatihan ini bukan sekadar latihan menulis, melainkan latihan berpikir strategis untuk memecahkan masalah publik.



Tantangan global seperti perubahan iklim, disrupti teknologi, dan ketidakpastian ekonomi menuntut respons kebijakan yang cepat dan tepat. *Policy brief* memungkinkan analis untuk menyajikan skenario dan implikasi kebijakan secara cepat kepada pengambil keputusan. Tanpa kemampuan ini, risiko kesalahan kebijakan (*policy failure*) akan meningkat karena kurangnya informasi yang tersaring dengan baik.

Laboratorium Governance and Public Policy berkomitmen untuk terus mengembangkan materi pelatihan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Modul ini akan terus diperbarui seiring dengan perkembangan metodologi analisis kebijakan dan dinamika tata kelola pemerintahan. Diharapkan peserta pelatihan tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu memproduksi *Policy brief* yang siap pakai (*ready-to-use*) dalam lingkungan kerja masing-masing.



Gambar 1. 1 Siklus Kebijakan Publik dan Posisi Policy brief

Seperti terlihat pada Gambar 1.1, *Policy brief* berfungsi sebagai katalisator dalam siklus kebijakan. Ia dapat muncul di awal untuk mendefinisikan masalah, di tengah untuk menawarkan solusi, atau di akhir untuk merekomendasikan perbaikan berdasarkan evaluasi. Fleksibilitas ini membuat keterampilan penyusunan *Policy brief* menjadi sangat relevan bagi berbagai jenjang jabatan, mulai dari analis ahli muda hingga pejabat pimpinan tinggi.

Dalam konteks Indonesia, penggunaan *Policy brief* juga sejalan dengan semangat Meritokrasi Birokrasi. Dokumen yang berkualitas mencerminkan kompetensi aparatur. Oleh karena itu, modul ini disusun dengan mengacu pada standar kompetensi analis kebijakan nasional serta praktik terbaik internasional (*best practices*).



Penyusunan modul ini melibatkan kajian literatur mendalam serta pengalaman empiris dari para praktisi di Laboratorium Governance dan Public Policy. Kami menggabungkan pendekatan akademis yang rigor dengan pendekatan praktis yang aplikatif. Tujuannya adalah agar peserta dapat langsung menerapkan ilmu yang didapat segera setelah pelatihan selesai.

1. Pentingnya Policy Brief dalam Proses Kebijakan Publik

Policy brief merupakan salah satu instrumen penting dalam ekosistem pembuatan kebijakan publik modern. Dalam era informasi yang serba kompleks, pengambil keputusan memerlukan ringkasan yang jelas, singkat, dan actionable dari hasil-hasil penelitian kebijakan. *Policy brief* hadir sebagai jembatan antara dunia akademik dan praktik pemerintahan.

Perkembangan teknologi informasi dan kompleksitas isu-isu publik telah mengubah cara pemerintah membuat keputusan. Semakin banyaknya data dan penelitian yang tersedia membuat pengambil keputusan membutuhkan ringkasan eksekutif yang dapat dipahami dengan cepat namun tetap komprehensif.

2. Definisi dan Ruang Lingkup

Policy brief adalah dokumen singkat (umumnya 1-4 halaman) yang menyajikan: - Ringkasan masalah kebijakan - Analisis mendalam tentang isu yang dihadapi - Opsi-opsi alternatif kebijakan - Rekomendasi spesifik untuk pengambilan keputusan

Policy brief berbeda dengan penelitian akademik yang panjang. *Policy brief* dirancang untuk komunikasi cepat dengan fokus pada keputusan praktis.

3. Konteks Pemerintahan Indonesia

Dalam konteks pemerintahan Indonesia, terutama di Kementerian Dalam Negeri, *Policy brief* menjadi semakin penting karena:

- a. **Peningkatan efisiensi administratif:** *Policy brief* membantu pimpinan pemerintahan membuat keputusan lebih cepat
- b. **Transparansi kebijakan:** *Policy brief* memudahkan stakeholder memahami dasar pengambilan keputusan
- c. **Koordinasi antar lembaga:** *Policy brief* memfasilitasi koordinasi yang lebih baik dalam implementasi kebijakan
- d. **Akuntabilitas publik:** *Policy brief* mendokumentasikan proses pemikiran di balik keputusan publik



4. Peran Laboratorium Governance dan Public Policy

Laboratorium *Governance* dan *Public Policy* memiliki peran strategis dalam: Mengembangkan kapasitas aparatur negara dalam analisis kebijakan, Menyediakan panduan praktis untuk penulisan *Policy brief* yang efektif, Melaksanakan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi kebijakan, Membangun jaringan pemikir kebijakan di seluruh Indonesia.

B. HASIL BELAJAR

Setelah menyelesaikan modul ini, peserta diharapkan dapat:

1. **Memahami konsep dan jenis-jenis *Policy brief*** yang relevan dengan konteks pemerintahan Indonesia
2. **Menganalisis masalah kebijakan** secara sistematis dan terstruktur
3. **Menyusun *Policy brief*** yang efektif sesuai dengan standar dan kebutuhan lokal
4. **Menulis rekomendasi kebijakan** yang feasible dan implementable
5. **Mengkomunikasikan hasil analisis** kepada berbagai stakeholder dengan cara yang persuasif namun berbasis fakta
6. **Menerapkan standar penulisan *Policy brief*** dalam konteks Pelayanan Kementerian Dalam Negeri tingkat I

C. MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK

Materi Pokok I: Landasan Konseptual dan Strategi *Policy brief*

1. Definisi dan karakteristik *Policy brief*
2. Jenis-jenis *Policy brief* dan peruntukannya
3. Perbedaan *Policy brief* dengan dokumen kebijakan lainnya
4. Kegiatan penyusunan *Policy brief*

Materi Pokok II: Pembuatan *Policy brief*

1. Tahapan persiapan dan riset
2. Struktur penulisan *Policy brief* yang efektif
3. Teknik penulisan yang persuasif
4. Penggunaan data dan evidensi
5. *Policy brief* dalam konteks PKN Tingkat I
6. Studi kasus dan praktik langsung



BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL DAN STRATEGI *POLICY BRIEF*

A. PENDAHULUAN

Komunikasi kebijakan merupakan aspek yang sering terabaikan dalam proses formulasi kebijakan. Sebuah analisis yang brilian akan menjadi tidak berguna jika tidak dapat dikomunikasikan dengan baik kepada pengambil keputusan. *Policy brief* hadir sebagai instrumen strategis untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

Berbeda dengan jurnal akademis atau laporan penelitian yang tebal, *Policy brief* dirancang untuk dibaca dalam waktu singkat (biasanya 5-10 menit). Fokus utamanya bukan pada metodologi penelitian yang rumit, melainkan pada implikasi kebijakan dan rekomendasi tindakan. Dalam bab ini, kita akan membedah landasan konseptual *Policy brief* serta strategi penggunaannya sebagai alat bantu keputusan.

Esensi dari *Policy brief* adalah "menerjemahkan" kompleksitas menjadi kesederhanaan tanpa mengurangi substansi kebenaran data. Ini adalah seni menyaring informasi. Dalam lingkungan pemerintahan yang serba cepat, pejabat pimpinan tinggi seringkali hanya memiliki waktu terbatas untuk membaca dokumen. *Policy brief* yang baik harus mampu menjawab pertanyaan: "Apa masalahnya?", "Apa buktinya?", dan "Apa yang harus kita lakukan?" dalam beberapa halaman pertama.

Laboratorium *Governance* dan *Public Policy* menekankan bahwa *Policy brief* bukan sekadar ringkasan (*summary*). Ia adalah dokumen persuasif yang memiliki landasan strategis. Ia harus mampu meyakinkan pembaca bahwa masalah yang diangkat adalah penting dan solusi yang ditawarkan adalah yang terbaik di antara opsi yang ada. Oleh karena itu, nada penulisan (*tone*) dalam *Policy brief* harus profesional, objektif, namun tegas.

Penting untuk dipahami bahwa *Policy brief* tidak berdiri sendiri. Ia seringkali merupakan turunan dari kajian yang lebih besar, seperti Naskah Akademik, Laporan Evaluasi Program, atau Kajian Strategis. Namun, *Policy brief* harus bisa berdiri sendiri (*stand-alone*), artinya pembaca tidak perlu merujuk ke dokumen induk untuk memahami rekomendasi yang diberikan.

Keberhasilan sebuah *Policy brief* diukur dari dampaknya secara strategis. Apakah dokumen tersebut dibaca? Apakah dokumen tersebut didiskusikan dalam rapat kebijakan? Apakah rekomendasinya diadopsi menjadi regulasi atau keputusan pimpinan?



Indikator-indikator ini menjadi tolak ukur kualitas komunikasi tertulis yang kita bangun dalam modul ini.

Kebijakan publik yang efektif memerlukan fondasi analisis yang kuat. Namun, analisis yang mendalam tidaklah cukup jika hasil-hasilnya tidak dapat dikomunikasikan dengan baik kepada pengambil keputusan. Di sinilah peran *Policy brief* menjadi krusial. *Policy brief* adalah medium komunikasi yang menghubungkan: - **Peneliti/Analisis** → menghasilkan temuan dan rekomendasi - **Pengambil Keputusan** → memerlukan informasi singkat dan actionable - **Implementer** → memerlukan panduan teknis untuk pelaksanaan.



Gambar 1. 2 Siklus Proses Pembuatan Kebijakan

Policy brief berperan sebagai penghubung kritis antara fase analisis dan pengambilan keputusan. Efektivitas *Policy brief* akan berdampak pada kualitas keputusan yang diambil.

B. KONSEP DAN JENIS *POLICY BRIEF*

1. Konsep Dasar

Policy brief adalah dokumen singkat dan ringkas yang menyajikan analisis mendalam tentang masalah kebijakan tertentu serta rekomendasi kebijakan yang spesifik, terukur, dan dapat diimplementasikan. Karakteristik utama *Policy brief* adalah:

Karakteristik Utama:

- a. Ringkas: Biasanya 2-4 halaman, maksimal 8 halaman.
- b. Fokus: Hanya membahas satu isu spesifik.
- c. Berbasis Bukti: Menggunakan data valid, bukan opini pribadi.



- d. Berorientasi Solusi: Menawarkan rekomendasi yang jelas.
- e. Aksesibel: Menggunakan bahasa yang bebas dari jargon akademis yang berlebihan.

Karakteristik pertama adalah keringkasan, yang menjadi syarat mutlak agar dokumen dapat dibaca secara efektif oleh pembuat kebijakan yang memiliki waktu terbatas. *Policy brief* dirancang sebagai dokumen yang sangat singkat dan padat informasi. Umumnya *Policy brief* terdiri dari 2-4 halaman, dengan batasan maksimal 8 halaman. Penggunaan format yang ringkas ini disengaja karena pembuat kebijakan seringkali tidak memiliki waktu untuk membaca makalah ilmiah yang panjang dan kompleks. Dokumen yang pendek tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga meningkatkan kemungkinan pembaca untuk mencerna dan mengingat informasi penting yang disajikan. Dengan membatasi jumlah halaman, *Policy brief* memaksa penulis untuk memilih informasi yang paling kritis dan relevan, sehingga setiap kata memiliki nilai dan tujuan yang jelas.

Karakteristik kedua adalah fokus yang tajam pada satu isu spesifik tertentu. Sebuah *Policy brief* yang efektif hanya membahas satu isu spesifik secara mendalam, bukan mencoba mencakup berbagai topik sekaligus. Fokus ini memungkinkan pembaca untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang masalah tertentu tanpa kebingungan dari isu-isu yang bersaing untuk perhatian mereka. Dengan memusatkan perhatian pada satu isu, penulis dapat mengembangkan argumen yang kuat dan logis, mulai dari identifikasi masalah, analisis penyebabnya, hingga solusi yang diusulkan. Pendekatan yang terfokus ini juga memudahkan pengambil kebijakan untuk membuat keputusan yang tepat karena mereka memiliki gambaran yang jelas tentang konteks masalah dan opsi-opsi yang tersedia.

Karakteristik ketiga adalah sifatnya yang berbasis bukti, yang menjadi fondasi kredibilitas dari sebuah *Policy Brief*. Dokumen ini harus disusun menggunakan data yang valid, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan dari sumber yang kredibel, seperti statistik resmi, hasil evaluasi program, atau kajian literatur yang terpercaya, bukan sekadar berdasarkan opini pribadi atau asumsi penulis. Penggunaan bukti empiris yang kuat berfungsi untuk memperkuat argumen analisis masalah dan meminimalisasi bias subjektif. Hal ini penting agar pengambil keputusan dapat percaya bahwa rekomendasi yang diajukan memiliki landasan faktual yang kokoh, sehingga risiko kesalahan kebijakan akibat informasi yang menyesatkan dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan menggunakan data valid, *policy brief* meningkatkan kredibilitas dan



kepercayaan pembuat kebijakan terhadap rekomendasi yang diberikan. Bukti yang disajikan harus transparan, termasuk kekuatan dan kelemahan dari basis bukti yang mendasarinya, sehingga pengambil keputusan dapat membuat penilaian yang terinformasi dengan baik.

Karakteristik keempat adalah orientasi yang kuat terhadap solusi atau tindakan nyata. Berbeda dengan karya akademis yang mungkin hanya berhenti pada analisis masalah, *Policy Brief* wajib menawarkan rekomendasi kebijakan yang jelas, konkret, dan dapat diimplementasikan. Rekomendasi ini harus menjawab pertanyaan "apa yang harus dilakukan", "oleh siapa", dan "bagaimana caranya", serta menyertakan pertimbangan mengenai feasibilitas politik, anggaran, dan teknis. Orientasi solusi ini membedakan *policy brief* dari makalah penelitian akademis murni, karena *policy brief* dirancang untuk langsung menginformasikan dan memandu keputusan kebijakan. Dengan menyediakan rekomendasi yang jelas dan dapat dilaksanakan, *policy brief* memfasilitasi transisi dari penelitian ke tindakan praktis.

Karakteristik kelima adalah aksesibilitas, yang berkaitan dengan kemudahan dokumen untuk dipahami oleh audiens sasaran. *Policy Brief* harus menggunakan bahasa yang lugas, sederhana, dan bebas dari jargon akademis atau istilah teknis yang berlebihan yang mungkin hanya dimengerti oleh kalangan spesifik. Tujuannya adalah memastikan bahwa pesan kebijakan dapat tersampaikan secara efektif kepada pembuat keputusan yang mungkin tidak memiliki latar belakang keahlian teknis pada isu tersebut. Selain aspek bahasa, aksesibilitas juga didukung oleh tata letak yang rapi, penggunaan visualisasi data yang jelas, dan struktur penulisan yang sistematis, sehingga dokumen tersebut ramah bagi pembacaan cepat (*skimming*) tanpa kehilangan makna substansialnya.

Semua lima karakteristik ini bekerja secara sinergis untuk membuat *policy brief* menjadi alat komunikasi yang efektif antara peneliti dan pembuat kebijakan. Kombinasi dari keringkasan, fokus, dasar bukti, orientasi solusi, dan aksesibilitas bahasa menciptakan dokumen yang bernilai tinggi dalam menutup kesenjangan antara penelitian akademis dan praktik kebijakan publik.

2. Jenis-Jenis Policy brief

Tidak semua *Policy Brief* memiliki tujuan yang sama. Berdasarkan tujuannya, kita dapat mengklasifikasikan *Policy Brief* ke dalam beberapa jenis:



- a. **Advocacy Policy Brief:** Jenis ini bertujuan untuk mempromosikan satu solusi tertentu. Penulis sudah memiliki posisi yang jelas dan menggunakan data untuk mendukung argumen tersebut. Biasanya digunakan oleh organisasi masyarakat sipil atau unit kerja yang ingin mendorong agenda tertentu.
- b. **Objective Policy Brief:** Jenis ini menyajikan berbagai opsi kebijakan beserta kelebihan dan kekurangannya secara seimbang. Tujuannya adalah memberikan gambaran utuh kepada pengambil keputusan tanpa memaksakan satu pilihan. Ini umum digunakan oleh badan riset pemerintah atau think-tank.
- c. **Technical Policy Brief:** Fokus pada aspek teknis implementasi dari sebuah kebijakan yang sudah diputuskan. Isinya lebih banyak mengenai prosedur, standar operasional, atau kebutuhan sumber daya.

Pemilihan jenis *Policy Brief* harus disesuaikan dengan audiens dan tahap kebijakan. Jika audiens adalah Menteri yang butuh keputusan cepat untuk isu krisis, *Advocacy Brief* mungkin lebih tepat. Jika audiens adalah Tim Perumus Undang-Undang yang butuh perbandingan, *Objective Brief* lebih sesuai.

Dalam konteks Laboratorium *Governance* dan *Public Policy*, kita menganjurkan penggunaan pendekatan *Objective* yang mengarah pada *Advocacy*. Artinya, penulis menyajikan opsi secara adil, namun berdasarkan analisis bukti, penulis merekomendasikan satu opsi terbaik dengan argumen yang kuat. Ini menjaga integritas akademis sekaligus memberikan kepastian arah bagi pemimpin.

Selain berdasarkan tujuan, *Policy Brief* juga dapat dibedakan berdasarkan sumber datanya, yaitu *Primary Data Brief* (berdasarkan riset lapangan baru) dan *Secondary Data Brief* (berdasarkan sintesis literatur dan data sekunder yang sudah ada). Untuk efisiensi waktu dalam birokrasi, *Secondary Data Brief* yang berkualitas seringkali lebih disukai asalkan sumber datanya kredibel.

Policy brief dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai dimensi:

a) Berdasarkan Dimensi Waktu:

JENIS	DESKRIPSI	CONTOH
Briefing Note	Ringkasan cepat tentang isu terkini	Analisis dampak kenaikan harga BBM
Analytical Brief	Analisis mendalam tentang masalah tertentu	Evaluasi kebijakan tata ruang regional
Options Brief	Menyajikan beberapa alternatif kebijakan	Tiga opsi pendekatan untuk mengatasi pengangguran



b) Berdasarkan Tujuan:

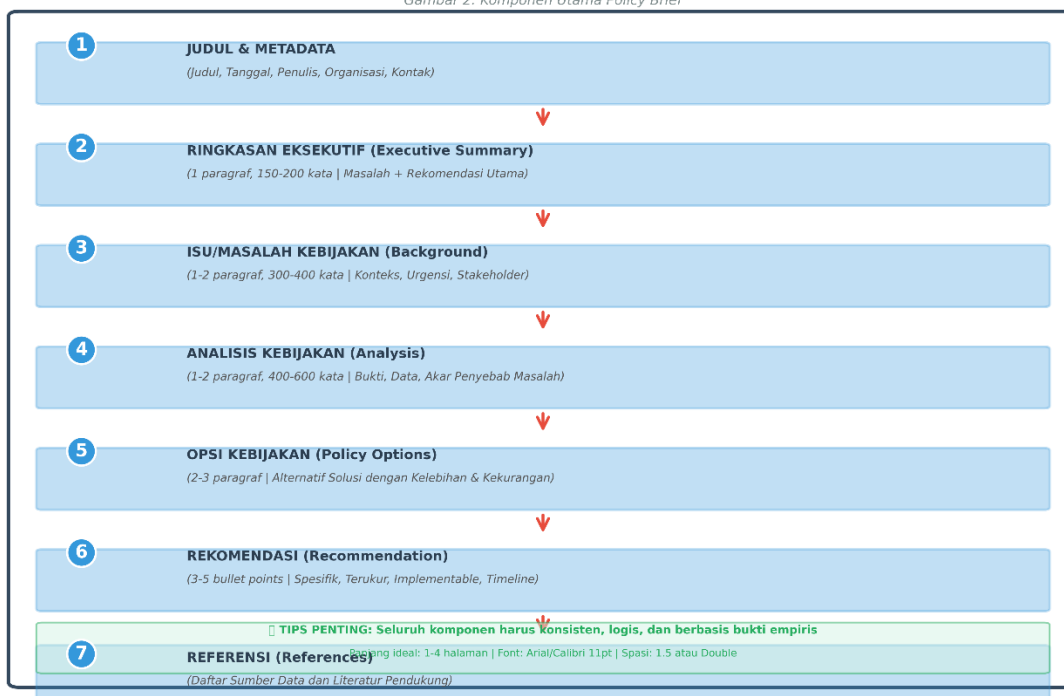
JENIS	TUJUAN	AUDIENCE
Policy Update	Menginformasikan perkembangan kebijakan	Pimpinan/Decision Maker
Problem Brief	Mendefinisikan masalah dan urgensinya	Legislator/Perumus Kebijakan
Solution Brief	Menawarkan solusi untuk masalah tertentu	Administrator/Implementer
Impact Brief	Menganalisis dampak kebijakan yang ada	Evaluator/Oversight Body

c) Berdasarkan Target Audience:

1. **Executive Brief:** Untuk pimpinan tinggi dengan keterbatasan waktu
2. **Technical Brief:** Untuk para ahli dan technical staff
3. **Public Brief:** Untuk konsumsi publik/media massa
4. **Legislative Brief:** Untuk anggota legislatif

STRUKTUR KOMPONEN POLICY BRIEF

Gambar 2: Komponen Utama Policy Brief



Gambar 1. 3 Komponen Utama Policy brief

C. KEGIATAN PENYUSUNAN POLICY BRIEF

1. Fase Persiapan

Langkah 1: Identifikasi Isu dan Masalah



Langkah pertama adalah mendefinisikan masalah kebijakan (*policy problem*) dengan jelas. Masalah harus spesifik, terukur, dan relevan. Jangan mengangkat masalah yang terlalu umum seperti "Kemiskinan", tetapi spesifik seperti "Efektivitas Bantuan Sosial Tunai di Wilayah X". Selain masalah, kenali siapa audiens Anda. Apakah mereka Menteri, Gubernur, atau Kepala Dinas? Setiap level memiliki prioritas informasi yang berbeda. Pimpinan tinggi lebih tertarik pada implikasi politik dan anggaran, sedangkan pimpinan menengah lebih tertarik pada aspek operasional.

Dalam fase ini, Anda perlu:

- a. Memahami konteks kebijakan yang sedang berkembang
- b. Mengidentifikasi gap antara kondisi ideal dan kondisi aktual
- c. Menentukan siapa decision maker yang akan menerima *Policy brief*
- d. Memahami timeline pengambilan keputusan

Pertanyaan Kunci:

- Apa masalah kebijakan yang ingin Anda analisis? - Mengapa masalah ini penting dan mendesak? - Siapa yang perlu membuat keputusan? - Kapan keputusan tersebut harus dibuat? - Informasi apa yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan?

Langkah 2: Riset dan Pengumpulan Data

Kumpulkan data yang relevan untuk mendukung analisis masalah. Data dapat berupa statistik resmi (BPS), hasil evaluasi program, atau studi literatur. Penting untuk memverifikasi kredibilitas sumber data. *Policy Brief* yang lemah biasanya disebabkan oleh data yang usang atau sumber yang bias.

Dalam tahap ini, lakukan juga analisis pemangku kepentingan (*stakeholder analysis*). Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dari kebijakan yang akan direkomendasikan? Memetakan ini akan membantu dalam menyusun strategi rekomendasi yang politis namun tetap etis.

Penyusunan *Policy brief* yang berkualitas memerlukan riset yang komprehensif:

Jenis Data yang Diperlukan:

1. Data Sekunder:

- a) Penelitian akademis
- b) Laporan pemerintah
- c) Publikasi internasional
- d) Statistik resmi

2. Data Primer (jika diperlukan):



- a) Wawancara dengan stakeholder
- b) Focus Group Discussion (FGD)
- c) Survey/polling
- d) Observasi lapangan

Evaluasi Kualitas Data:

- **Relevance:** Apakah data relevan dengan masalah yang dianalisis? - **Reliability:** Apakah sumber data dapat dipercaya? - **Recency:** Apakah data masih current dan up-to-date? - **Representativeness:** Apakah data mewakili populasi yang diteliti?

Langkah 3: Analisis dan Sintesis

Jangan pernah hanya memberikan satu solusi tanpa alternatif. Minimal, sajikan dua atau tiga opsi kebijakan.

- **Opsi 1:** *Status Quo* (Tidak melakukan apa-apa). Jelaskan risikonya.
- **Opsi 2:** Solusi Moderat.
- **Opsi 3:** Solusi Transformatif.

Setiap opsi harus dianalisis dampaknya, biaya yang dibutuhkan, dan feasibilitasnya. Gunakan matriks analisis untuk membandingkan opsi-opsi tersebut secara visual. Setelah mengumpulkan data, lakukan analisis:

Framework Analisis:

- **PESTEL Analysis:** Menganalisis faktor Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Lingkungan, Hukum - **Stakeholder Mapping:** Mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dan kepentingan mereka - **Problem Tree Analysis:** Memahami akar penyebab masalah - **Cost-Benefit Analysis:** Membandingkan manfaat dan biaya dari setiap opsi kebijakan.

2. Fase Drafting

Langkah 4: Menulis Draf Awal

Mulailah menulis dengan struktur yang jelas (akan dibahas detail di Bab III). Gunakan prinsip *pyramid* dalam menulis: sampaikan kesimpulan utama di awal, baru kemudian argumen pendukung. Gunakan kalimat aktif, hindari kalimat pasif yang bertele-tele. Gunakan *bullet points* untuk memudahkan pembacaan cepat (*skimming*).

Tips penulisan: - Mulai dengan *outline* yang jelas - Tulis dengan kalimat yang sederhana namun profesional - Gunakan data konkret dan spesifik - Hindari jargon yang rumit kecuali untuk audience ahli - Setiap klaim didukung oleh bukti



Langkah 5: Revisi dan Refinement

Sebelum disebarluaskan, draf *Policy Brief* harus melalui proses review. Review dapat dilakukan secara internal oleh tim ahli di Laboratorium atau secara eksternal oleh pakar substansi. Fokus review adalah pada akurasi data, kejelasan rekomendasi, dan kesesuaian bahasa.

Pastikan juga aspek desain grafis diperhatikan. *Policy Brief* yang baik tidak hanya bagus isinya, tapi juga menarik tampilannya. Penggunaan infografis sederhana, kotak teks (*text box*), dan grafik yang jelas sangat disarankan.

Proses revisi sangat penting: - Periksa logika dan konsistensi argumen - Validasi semua data dan referensi - Pastikan rekomendasi feasible dan cost-effective - Baca ulang untuk clarity dan coherence - Minta feedback dari kolega atau subject matter expert.

3. Fase Finalisasi

Langkah 6: Formatting dan Presentasi

- a. Gunakan format yang konsisten
- b. Tambahkan visual (grafik, tabel, diagram) jika diperlukan
- c. Sesuaikan dengan brand guidelines organisasi
- d. Pastikan metadata lengkap (tanggal, penulis, disclaimer jika ada)

Langkah 7: Disseminasi

Karya tulis tidak ada gunanya jika tidak sampai ke tangan pengambil keputusan. Rencanakan strategi diseminasi. Apakah akan disampaikan dalam rapat terbatas, dikirimkan melalui memo resmi, atau dipublikasikan dalam website instansi? Timing juga penting; sampaikan *Policy Brief* saat isu tersebut sedang hangat atau saat anggaran sedang direncanakan.

- a. Identifikasi saluran komunikasi yang tepat
- b. Tailoring message untuk berbagai audience
- c. Persiapkan presentasi oral jika diperlukan
- d. Monitor feedback dan uptake dari *Policy brief*

Tantangan Umum dalam Penyusunan

Dalam pengalaman pelatihan di Laboratorium, terdapat beberapa tantangan umum yang sering dihadapi peserta:

- a. **Terlalu Akademis:** Menggunakan bahasa teori yang sulit dipahami praktisi.
- b. **Kurang Data:** Lebih banyak opini daripada fakta.



- c. **Rekomendasi Lemah:** Rekomendasi bersifat normatif (contoh: "Perlu peningkatan koordinasi") tanpa menjelaskan *bagaimana* caranya.
- d. **Terlalu Panjang:** Tidak mampu menyaring informasi penting.
- e. Untuk mengatasi hal ini, penulis disarankan untuk selalu bertanya: "Jika saya hanya punya waktu 2 menit untuk membaca ini, bagian mana yang paling penting?" Bagian itulah yang harus ditonjolkan.

Peran Bukti dalam Policy Brief

Kata "Brief" dalam *Policy Brief* tidak berarti mengorbankan kedalaman analisis. Bukti harus tetap kuat. Namun, penyajiannya yang disesuaikan. Data statistik sebaiknya ditampilkan dalam bentuk grafik, bukan tabel yang rumit. Kutipan ahli digunakan untuk memperkuat argumen, bukan untuk pamer referensi.

Referensi dalam *Policy Brief* biasanya diletakkan dalam catatan kaki (*footnote*) yang minim atau daftar pustaka ringkas di halaman terakhir. Tujuannya agar tidak mengganggu alur bacaan utama. Namun, integritas sitasi tetap harus dijaga untuk menghindari plagiarisme dan memastikan ketelusuran data.

Etika Penyusunan Policy Brief

Sebagai produk publik, *Policy Brief* harus mematuhi etika tertentu:

- a. **Objektivitas:** Tidak memanipulasi data untuk mendukung kepentingan golongan tertentu.
- b. **Transparansi:** Menjelaskan sumber pendanaan kajian jika ada konflik kepentingan.
- c. **Kerahasiaan:** Menjaga data sensitif negara atau privasi individu jika menggunakan data mikro.
- d. **Akuntabilitas:** Penulis harus berani bertanggung jawab atas rekomendasi yang diberikan.

Laboratorium Governance and Public Policy menekankan integritas ini sebagai fondasi utama. *Policy Brief* yang tidak etis dapat menyesatkan kebijakan publik dan merugikan masyarakat dalam jangka panjang.



STUDI KASUS SINGKAT:

Kebijakan Parkir Sebagai ilustrasi, mari kita lihat contoh sederhana. *Masalah:* Kemacetan di pusat kota akibat parkir liar. *Analisis:* Data menunjukkan 40% kemacetan disebabkan oleh kendaraan yang mencari parkir. *Opsi:*

- a. Tilang tegas (Biaya politik tinggi).
- b. Bangun gedung parkir (Biaya anggaran tinggi).
- c. Aplikasi parkir digital + Tarif dinamis (Biaya moderat, teknologi tersedia).

Rekomendasi: Opsi 3, dengan pilot project di 2 kecamatan.

Dari contoh di atas, terlihat bagaimana *Policy Brief* memotong kompleksitas menjadi alur logis yang mudah diikuti. Tidak perlu menjelaskan teori ekonomi parkir secara detail, cukup fokus pada dampak solusi terhadap kemacetan.

Pentingnya Visualisasi Data Di era informasi visual, teks saja tidak cukup. *Policy Brief* modern harus menyertakan elemen visual. Grafik batang untuk perbandingan, grafik garis untuk tren waktu, dan peta untuk sebaran geografis. Namun, pastikan visualisasi tidak *misleading*. Skala grafik harus proporsional.

Laboratorium menyarankan penggunaan palet warna yang konsisten dengan identitas instansi namun tetap ramah bagi penderita buta warna (*colorblind friendly*). Keterbacaan adalah kunci utama desain *Policy Brief*.

Kolaborasi dalam Penyusunan Penyusunan *Policy Brief* yang berkualitas jarang dilakukan sendirian. Dibutuhkan kolaborasi antara analis substansi (yang paham isi kebijakan) dan analis komunikasi (yang paham cara penyajian). Di lingkungan instansi pemerintah, ini berarti kerja sama antara Biro Perencanaan (Bappenas/Bappeda) dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis.

Modul ini mendorong pendekatan kolaboratif. Dalam sesi latihan nanti, peserta akan bekerja dalam kelompok untuk mensimulasikan proses kolaborasi ini. Masukan dari berbagai perspektif akan memperkaya analisis dan membuat rekomendasi lebih komprehensif.

Adaptasi terhadap Konteks Lokal Meskipun prinsip *Policy Brief* bersifat universal, penerapannya harus disesuaikan dengan konteks lokal Indonesia. Budaya konsensus (*musyawarah mufakat*) dalam pengambilan keputusan di Indonesia berarti *Policy Brief* harus menyajikan opsi yang memungkinkan dialog, bukan opsi yang memojokkan pihak tertentu.



Bahasa yang digunakan juga harus menyesuaikan dengan tata naskah dinas yang berlaku di instansi masing-masing, tanpa mengurangi esensi ringkas dari *Policy Brief* itu sendiri. Keseimbangan antara format baku birokrasi dan fleksibilitas *Policy Brief* adalah seni yang harus dikuasai.

Evaluasi Kualitas Policy Brief Bagaimana kita tahu sebuah *Policy Brief* itu bagus?

Laboratorium Governance dan Public Policy menggunakan rubrik penilaian sederhana:

- a. **Relevansi:** Apakah isunya penting saat ini?
- b. **Kejelasan:** Apakah bahasanya mudah dimengerti?
- c. **Kredibilitas:** Apakah datanya dapat dipertanggungjawabkan?
- d. **Aksi:** Apakah rekomendasinya bisa dilaksanakan?
- e. **Desain:** Apakah tampilannya menarik dan rapi?

Peserta diharapkan menggunakan rubrik ini untuk menilai karya sendiri maupun karya rekan lainnya selama pelatihan.

Penutup

Bab ini telah menguraikan landasan konseptual, jenis, dan strategi penyusunan *Policy Brief*. Pemahaman ini adalah fondasi sebelum kita masuk ke teknis penulisan di Bab III. Ingatlah bahwa *Policy Brief* adalah alat kekuasaan (*tool of power*) dalam arti positif; ia adalah alat untuk mengubah ide menjadi tindakan nyata yang memperbaiki kehidupan publik.



BAB III

PEMBUATAN *POLICY BRIEF*

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, esensi dari penyusunan *policy brief* ialah mengonversi hasil analisis (baik masalah maupun solusi) menjadi narasi tertulis yang singkat dan padat. Meskipun format penulisan dapat bervariasi, keberadaan kedua komponen analisis tersebut bersifat mutlak. Variasi struktur biasanya bergantung pada preferensi penulisan; ada yang hanya memuat analisis masalah dan solusi, sedangkan lainnya lebih rinci dengan menyertakan rekomendasi dan data pendukung. Dari segi panjang, *policy brief* umumnya berkisar antara 1-2 halaman (sekitar 700 kata) hingga maksimal 8 halaman (3000 kata). Pembatasan ini dirancang agar sesuai dengan keterbatasan waktu pembaca dalam menyerap informasi. Agar lebih menarik perhatian, penyajian visual seperti infografis dan ilustrasi sangat disarankan untuk mendukung kualitas dokumen."

Pembuatan *Policy brief* yang berkualitas memerlukan:

1. Pemahaman mendalam tentang masalah kebijakan
2. Kemampuan menganalisis informasi kompleks
3. Skill komunikasi yang baik
4. Perhatian terhadap detail
5. Kemampuan untuk menyederhanakan tanpa mengorbankan akurasi

Dalam *policy brief*, prioritas utama adalah menyajikan hasil dan rekomendasi, bukan memaparkan secara rinci teknik atau metode analisis ilmiah yang digunakan. Hal ini dikarenakan tujuan utamanya adalah menginformasikan solusi kebijakan publik kepada pembuat keputusan. Dengan demikian, meskipun proses di baliknya bersifat ilmiah, dokumen ini lebih berfokus pada 'penjualan' ide. Fleksibilitas struktur dan panjang halaman diperbolehkan selama tujuan untuk meyakinkan *decision maker* tersebut tercapai.

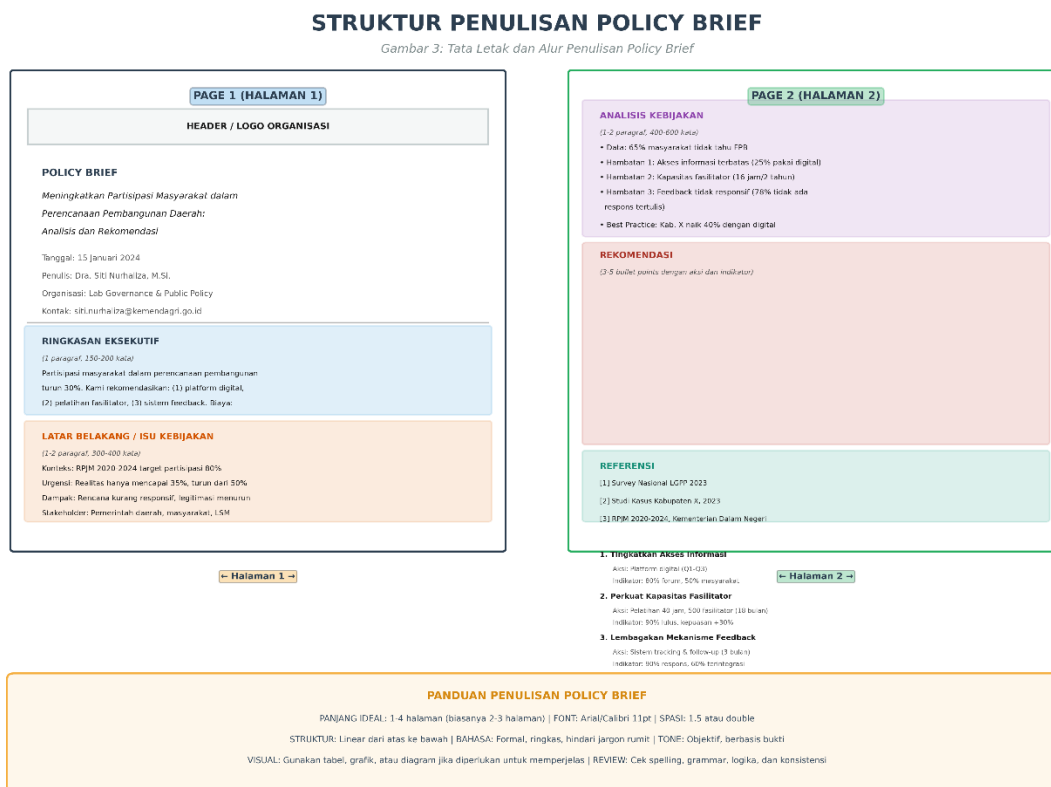
B. STRUKTUR PENULISAN *POLICY BRIEF*

Beragam struktur *policy brief* memang tersedia, namun inti dari semuanya tetaplah analisis masalah dan solusi. Dalam Pelatihan penulisan ini bertujuan menanggapi perdebatan kebijakan, menuntut penyajian kedua komponen tersebut secara tepat dan



ringkas. Struktur yang disajikan dapat disesuaikan secara fleksibel dengan kebutuhan pelatihan, selama elemen analisis masalah dan solusi tetap tergambar dengan jelas.

1. Template Standar Policy brief



Gambar 1. 4 Struktur Penulisan Policy brief

2. Panduan Penulisan Setiap Bagian

A. Judul (Title)

Karakteristik judul yang baik:

1. Spesifik dan deskriptif (bukan terlalu umum)
2. Menarik dan informatif
3. Mencerminkan isi Policy brief
4. Hindari judul yang terlalu panjang (maksimal 15 kata)
5. Gunakan kata kerja aktif jika memungkinkan

Contoh Judul:

✗ TIDAK BAIK: "Masalah Pelayanan Publik"

☑ BAIK: "Meningkatkan Responsivitas Pelayanan Publik: Analisis dan Rekomendasi Reformasi"



Judul	Catatan
Krisis Literasi Digital: Apa Yang Dapat dilakukan?	Membuat policy brief dalam bentuk pertanyaan akan menarik orang untuk mencari jawaban dalam teks/body
Korupsi, Kolusi dan Kerugian Negara	Judul singkat yang to-the point tentang 3 aspek utama yang akan diperoleh pembaca dalam policy brief
Digital Ethics: Pendekatan Perilaku Ampuh di Era Digital	Judul Utama Digital Ethics adalah isi atau focus policy brief, sub judul memberikan penjelasan lebih lanjut dan mengundang pembaca untuk membaca
Krisis Garam di Indonesia: dibutuhkan Aksi Nyata bukan Kata	Judul Utama Krisis Garam di Indonesia adalah focus atau isi policy brief, sub judul dibutuhkan aksi nyata bukan kata mendorong urgensi isu untuk memprovokasi p engambil keputusan/pembaca
Digital Safety: Tantangan keamanan identitas di Era Digital	Policy brief menunjukkan cara (digital safety) mengamankan identitas di era digital
Quo Vadis Staf Ahli Gubernur?	Judul singkat dan provokatif
'Memanusiakan' Pekerja Migran: Mengikis Utopia Kehadiran Negara	Judul utama adalah focus policy brief, dan sub judul memberikan penjelasan lebih lanjut untuk judul utama

Sumber: Modul Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Policy Brief- LAN RI

B. Metadata (Tanggal, Penulis, Organisasi)

Elemen ini penting untuk kredibilitas dan tracking dokumen:

1. **Tanggal:** Tulis dengan format lengkap (contoh: 15 Januari 2024)
2. **Penulis:** Nama lengkap dan posisi/title
3. **Organisasi:** Nama unit kerja atau lembaga
4. **Kontak:** Email atau nomor telepon untuk follow-up

C. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

Keterbatasan waktu sering kali membuat pembaca memutuskan apakah akan melanjutkan membaca *policy brief* hanya setelah melihat ringkasan eksekutif, pasca membaca judul. Agar minat baca tetap terjaga, ringkasan eksekutif perlu disajikan dengan jelas dan menarik. Inti dari bagian ini adalah menjawab tiga pertanyaan kunci: apa masalahnya, mengapa hal itu penting, dan bagaimana solusinya. Informasi mengenai aktor yang seharusnya menindaklanjuti rekomendasi juga dapat ditambahkan. Dalam konteks ini, penjelasan masalah menguraikan isu utama yang diangkat, sementara alasan urgensi merujuk pada dampak negatif yang dihasilkan oleh isu tersebut.

Bagian paling kritis dari *Policy brief*. Ini harus dapat berdiri sendiri dan memberikan gambaran lengkap masalah dan rekomendasi.

Struktur Ringkasan Eksekutif:

Sentence pertama: Pernyataan masalah yang jelas
Contoh: "Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum perencanaan pembangunan daerah menurun 30% dalam tiga tahun terakhir."



1. **Sentence 2-3:** Konteks dan urgensi
 - Mengapa ini penting?
 - Apa konsekuensi jika tidak ditangani?
2. **Sentence 4-5:** Analisis ringkas
 - Apa penyebab utama masalah?
 - Siapa yang terlibat?
3. **Sentence terakhir:** Rekomendasi utama
 - Apa yang harus dilakukan?
 - Hasil yang diharapkan?

Contoh Ringkasan Eksekutif:

"Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah mengalami penurunan signifikan sebesar 30% selama 2020-2023. Penurunan ini terjadi karena tiga faktor utama: keterbatasan informasi publik, rendahnya kapasitas fasilitasi di tingkat lokal, dan kurangnya insentif bagi partisipan. Apabila tidak ditangani, penurunan ini dapat mengakibatkan rencana pembangunan kurang responsif terhadap kebutuhan lokal dan menurunkan legitimasi kebijakan publik. Kami merekomendasikan peningkatan transparansi informasi melalui platform digital, pelatihan fasilitator di 100 desa, dan pelembagaan forum partisipasi masyarakat."

Panjang ideal: 150-200 kata (sekitar ½ halaman)

D. Latar Belakang (Background)

Bagian ini menjelaskan konteks dan mengapa masalah ini penting.

Yang harus disampaikan:

1. **Konteks umum:** Situasi sebelum masalah muncul
2. **Penggambaran masalah:** Apa yang terjadi saat ini?
3. **Urgensi:** Mengapa ini penting dan mendesak?
4. **Stakeholder:** Siapa saja yang terlibat dan terpengaruh?
5. **Relevansi kebijakan:** Bagaimana ini berkaitan dengan prioritas pemerintah?

Tips penulisan: - Gunakan data spesifik untuk mendukung pernyataan - Hindari narasi yang terlalu panjang - Gunakan transisi yang halus ke bagian analisis - Maksimal 300-400 kata



Contoh Paragraf Latar Belakang:

"Salah satu tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024 adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah hingga 80%. Namun, data yang dikumpulkan melalui survei nasional pada Mei 2023 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi aktif masyarakat hanya mencapai 35%, turun dari 50% pada 2019. Penurunan ini terutama terlihat di daerah-daerah tertinggal dan semi-urban. Rendahnya partisipasi ini berdampak pada kualitas rencana pembangunan yang kurang responsif terhadap kebutuhan lokal, dan pada gilirannya mengurangi legitimasi kebijakan publik di tingkat lokal."

E. Analisis (Analysis)

Bagian ini adalah jantung dari *Policy brief* di mana Anda menyajikan temuan dan bukti yang mendukung.

Struktur Analisis:

1. **Identifikasi masalah utama:** Apa akar permasalahannya?
2. **Presentasi bukti:** Data, riset, atau studi kasus yang mendukung
3. **Analisis sebab-akibat:** Mengapa masalah ini terjadi?
4. **Pemetaan stakeholder:** Siapa yang terlibat dan apa kepentingan mereka?
5. **Implikasi:** Apa yang akan terjadi jika masalah tidak ditangani?

Cara Menyajikan Data:

- Gunakan tabel atau grafik untuk data kompleks - Jelaskan angka-angka dengan kata-kata - Bandingkan dengan benchmark atau standar yang relevan - Sertakan pernyataan ahli atau best practice dari tempat lain

Contoh Analisis dengan Data:

"Data survei nasional menunjukkan bahwa 65% responden di daerah rural tidak mengetahui tentang forum perencanaan pembangunan (FPB) di wilayah mereka. Dari mereka yang mengetahui (35%), hanya 45% yang pernah menghadiri minimal satu sesi FPB. Analisis lebih lanjut mengungkapkan tiga hambatan utama: (1) Keterbatasan akses informasi: hanya 25% FPB yang menggunakan media digital; (2) Kapasitas fasilitasi yang terbatas: rata-rata fasilitator hanya menerima 16 jam pelatihan dalam dua tahun; (3) Rendahnya insentif partisipasi: 78% peserta melaporkan tidak ada follow-up terhadap masukan yang mereka berikan. Studi case di Kabupaten X menunjukkan bahwa dengan peningkatan transparansi informasi dan pelatihan fasilitator, partisipasi meningkat 40% dalam enam bulan pertama."

Panjang ideal: 400-600 kata



F. Rekomendasi (Recommendation)

Rekomendasi harus spesifik, terukur, dan dapat diimplementasikan.

Karakteristik rekomendasi yang baik:

1. **Spesifik:** Jelas mengenai APA yang harus dilakukan
2. **Terukur:** Ada indikator keberhasilan yang jelas
3. **Time-bound:** Ada timeline implementasi
4. **Resource-aware:** Mempertimbangkan ketersediaan resources
5. **Prioritas:** Diurutkan berdasarkan urgensi dan dampak

Format penulisan rekomendasi:

- Gunakan bullet points - Mulai dengan kata kerja aktif (Tingkatkan, Implementasikan, Fasilitasi, dll.) - Setiap rekomendasi disertai dengan aksi konkret - Sertakan indikator keberhasilan

Contoh Rekomendasi:

REKOMENDASI:

1. Tingkatkan Aksesibilitas Informasi tentang FPB Aksi: Kembangkan platform digital terintegrasi untuk publikasi jadwal, materi, dan hasil FPB Indikator: 80% forum publik mengakses platform dalam 12 bulan; 50% masyarakat mengetahui jadwal FPB
2. Perkuat Kapasitas Fasilitator Aksi: Sediakan pelatihan intensif (40 jam) untuk 500 fasilitator dalam 18 bulan Indikator: Fasilitator melewati assessment dengan skor minimal 80%; Kepuasan peserta FPB meningkat minimal 30%
3. Lembagakan Mekanisme Feedback Aksi: Terapkan sistem tracking untuk masukan masyarakat dengan follow-up wajib dalam 3 bulan Indikator: 90% masukan mendapat respons tertulis; 60% masukan terintegrasi dalam rencana pembangunan
4. Mobilisasi Sumber Daya Aksi: Alokasikan anggaran Rp 15 miliar dari APBD untuk tahun 2024 Indikator: Ketersediaan dana sesuai rencana; Tidak ada hambatan implementasi karena keterbatasan dana

3. Contoh Format Policy brief Lengkap

<p>'''</p> <hr/> <hr/> <p>POLICY BRIEF</p> <p>Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah: Analisis dan Rekomendasi</p> <hr/>
Tanggal: 15 Januari 2024
Penulis:, Analis Kebijakan



Organisasi: Laboratorium *Governance* dan *Public Policy*, STISIPOL Candradimuka

RINGKASAN EKSEKUTIF

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah mengalami penurunan 30% selama 2020-2023, turun dari 50% menjadi 35%. Analisis menunjukkan tiga hambatan utama: keterbatasan akses informasi, kapasitas fasilitasi yang rendah, dan kurangnya mekanisme feedback yang responsif. Kami merekomendasikan tiga aksi prioritas: (1) pengembangan platform digital untuk transparansi informasi; (2) pelatihan intensif 500 fasilitator dalam 18 bulan; (3) pelembagaan sistem feedback dengan follow-up wajib. Implementasi rekomendasi ini diproyeksikan dapat meningkatkan partisipasi menjadi 65% dalam 24 bulan dengan investasi Rp 15 miliar.

LATAR BELAKANG

Program perencanaan pembangunan yang partisipatif merupakan prioritas strategis pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJM 2020- 2024. Target naif adalah meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat aktif dari 40% (baseline 2019) menjadi 80% pada 2024. Namun, survei nasional yang dilakukan pada Mei 2023 menunjukkan data yang mengkhawatirkan: tingkat partisipasi aktif hanya mencapai 35%, bahkan turun dibandingkan periode sebelumnya. Fenomena ini terutama terlihat di daerah-daerah semi-urban dan tertinggal, di mana partisipasi hanya mencapai 18-25%. Penurunan ini memiliki implikasi signifikan terhadap kualitas dan legitimasi kebijakan publik di tingkat lokal. Forum Perencanaan Pembangunan (FPB) yang seharusnya menjadi medium dialog antara pemerintah dan masyarakat, menjadi semakin eksklusif dan tidak representative. Situasi ini mendesak untuk segera ditangani agar program perencanaan pembangunan tetap dapat mencapai tujuannya.

ANALISIS

Melalui survei nasional dan studi mendalam di 10 kabupaten, kami mengidentifikasi penyebab penurunan partisipasi. Data menunjukkan bahwa 65% masyarakat di area rural tidak mengetahui keberadaan FPB (Survei LGPP, 2023). Dari yang mengetahui, hanya 45% yang pernah menghadiri minimal satu sesi, jauh lebih rendah dari target 80%.

Penelusuran lebih lanjut mengungkapkan tiga hambatan utama:



Pertama, keterbatasan akses informasi. Survei menunjukkan bahwa hanya 25% FPB menggunakan media digital untuk mengumumkan jadwal dan materi diskusi. Mayoritas masih menggunakan pengumuman lisan atau pengumuman di kantor desa yang tidak terjangkau oleh seluruh masyarakat. Akibatnya, informasi tentang FPB tidak sampai ke 60% target audiens.

Kedua, kapasitas fasilitasi yang terbatas. Rata-rata fasilitator di tingkat lokal hanya menerima 16 jam pelatihan dalam dua tahun, jauh lebih rendah dari standar internasional (40-60 jam per tahun). Dampaknya, kualitas diskusi di FPB kurang mendalam dan kurang mampu menggali aspirasi mendalam masyarakat.

Ketiga, mekanisme feedback yang tidak responsif. Sebanyak 78% peserta FPB melaporkan bahwa masukan mereka tidak mendapat respons tertulis, dan mereka tidak tahu apakah masukan tersebut dipertimbangkan dalam penyusunan rencana. Fenomena ini menciptakan disinsentif untuk terus berpartisipasi.

Studi kasus di Kabupaten X menunjukkan bahwa dengan peningkatan transparansi informasi melalui media digital dan WhatsApp blast, partisipasi meningkat dari 25% menjadi 65% dalam enam bulan pertama. Peningkatan ini memberikan bukti empiris bahwa masalah partisipasi dapat diatasi dengan intervensi yang tepat sasaran.

REKOMENDASI

Berdasarkan analisis di atas, kami merekomendasikan tiga aksi prioritas:

1. Tingkatkan Aksesibilitas Informasi tentang FPB • Kembangkan platform digital terintegrasi untuk publikasi jadwal, materi, dan hasil FPB • Implementasi: Bulan 1-3: Desain dan development; Bulan 4-6: Soft launch dan training; Bulan 7-12: Full operasional • Indikator keberhasilan:
 - 80% forum publik mengakses platform dalam 12 bulan
 - 50% masyarakat mengetahui jadwal FPB di wilayah mereka
 - Tingkat partisipasi meningkat minimal 25%
2. Perkuat Kapasitas Fasilitator • Sediakan pelatihan intensif (40 jam) untuk 500 fasilitator dalam 18 bulan • Implementasi: Batch 1 (100 fasilitator, kuartal 1-2); Batch 2-5 (100 fasilitator per batch, per kuartal) • Indikator keberhasilan:
 - 90% fasilitator melewati assessment dengan skor $\geq 80\%$
 - Kepuasan peserta FPB meningkat minimal 30%
 - Rata-rata durasi FPB meningkat dari 90 menit menjadi 150 menit



3. **Lembagakan Mekanisme Feedback dan Follow-up** • Implementasikan sistem tracking untuk setiap masukan masyarakat dengan follow-up wajib dalam 3 bulan • Publikasikan hasil tracking setiap enam bulan • Implementasi: Bulan 1-2: Desain sistem; Bulan 3: Pilot di 10 kabupaten; Bulan 4-12: Roll out ke seluruh kabupaten • Indikator keberhasilan:

- 90% masukan mendapat respons tertulis dalam 3 bulan
- Minimal 60% masukan terintegrasi dalam rencana pembangunan
- Indeks kepuasan masyarakat terhadap responsivitas meningkat dari 45% menjadi 75%

ESTIMASI BIAYA DAN TIMELINE

Rekomendasi ini memerlukan investasi Rp 15 miliar dalam 24 bulan: - Platform digital dan pelatihan pengguna: Rp 4 miliar - Pelatihan fasilitator 500 orang: Rp 7 miliar



REFERENSI

- [1] T. Hoffmann et al., “Better reporting of interventions: template for intervention description and replication (TIDieR) checklist and guide,” *None*, Mar. 2014, doi: <https://doi.org/10.1136/bmj.g1687>.
- [2] J. L. Coulehan et al., “Let Me See If I Have This Right: Words That Help Build Empathy,” *American College of Physicians*, Aug. 2001, doi: <https://doi.org/10.7326/0003-4819-135-3-200108070-00022>.
- [3] A. Liberati et al., “The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate healthcare interventions: explanation and elaboration,” *BMJ*, Jul. 2009, doi: <https://doi.org/10.1136/bmj.b2700>.
- [4] J. W. Pennebaker, C. K. Chung, M. Ireland, and A. Gonzales, “The Development and Psychometric Properties of LIWC2015,” *Texas Digital Library*, Jan. 2015, doi: <https://doi.org/10.15781/t25p41>.
- [5] T. Greenhalgh, J. Howick, N. Maskrey, and F. T. E. B. M. R. Group, “Evidence based medicine: a movement in crisis?,” *None*, Jun. 2014, doi: <https://doi.org/10.1136/bmj.g3725>.
- [6] “Medical Professionalism in the New Millennium: A Physician Charter,” *American College of Physicians*, Feb. 2002, doi: <https://doi.org/10.7326/0003-4819-136-3-200202050-00012>.
- [7] Benkler and Yochai, “The wealth of networks: how social production transforms markets and freedom,” *Association of College and Research Libraries*, Oct. 2006, doi: <https://doi.org/10.5860/choice.44-0999>.
- [8] R. Brubaker, “Ethnicity without groups,” *Cambridge University Press*, Aug. 2002, doi: <https://doi.org/10.1017/s0003975602001066>.
- [9] A. -w. Chan et al., “SPIRIT 2013 explanation and elaboration: guidance for protocols of clinical trials,” *None*, Jan. 2013, doi: <https://doi.org/10.1136/bmj.e7586>.
- [10] L. J. Damschroder, C. M. Reardon, M. A. O. Widerquist, and J. C. Lowery, “The updated Consolidated Framework for Implementation Research based on user feedback,” *BioMed Central*, Oct. 2022, doi: <https://doi.org/10.1186/s13012-022-01245-0>.
- [11] B. Klepac, A. Mowle, T. Riley, and M. Craike, “Government, governance, and place-based approaches: lessons from and for public policy,” *Health Research Policy and Systems*, Nov. 2023, doi: [10.1186/s12961-023-01074-7](https://doi.org/10.1186/s12961-023-01074-7).
- [12] S. Ulucanlar et al., “Corporate Political Activity: Taxonomies and Model of Corporate Influence on Public Policy,” *International Journal of Health Policy and Management*, Apr. 2023, doi: [10.34172/ijhpm.2023.7292](https://doi.org/10.34172/ijhpm.2023.7292).
- [13] R. Zhang, L. Liu, and G. Wang, “Medical Policy Reform in the Digital Age: Responding to Health Crises Shaped by Internet Public Opinion,” *Risk Management and Healthcare Policy*, Oct. 2025, doi: [10.2147/RMHP.S547442](https://doi.org/10.2147/RMHP.S547442).



- [14] D. Cotton, P. A. Cotton, and J. R. Shipway, "Chatting and cheating: Ensuring academic integrity in the era of ChatGPT," Taylor & Francis, Mar. 2023, doi: <https://doi.org/10.1080/14703297.2023.2190148>.
- [15] Y. K. Dwivedi et al., "Artificial Intelligence (AI): Multidisciplinary perspectives on emerging challenges, opportunities, and agenda for research, practice and policy," Elsevier BV, Aug. 2019, doi: <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.08.002>.
- [16] J. Rudolph, S. Tan, and S. Tan, "ChatGPT: Bullshit spewer or the end of traditional assessments in higher education?," Canadian Philosophy of Education Society, Jan. 2023, doi: <https://doi.org/10.37074/jalt.2023.6.1.9>.
- [17] M. Sallam, "ChatGPT Utility in Healthcare Education, Research, and Practice: Systematic Review on the Promising Perspectives and Valid Concerns," Multidisciplinary Digital Publishing Institute, Mar. 2023, doi: <https://doi.org/10.3390/healthcare11060887>.
- [18] E. I. Benchimol et al., "The REporting of studies Conducted using Observational Routinely-collected health Data (RECORD) Statement," Public Library of Science, Oct. 2015, doi: <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001885>.
- [19] D. Dowell, T. M. Haegerich, and R. Chou, "CDC Guideline for Prescribing Opioids for Chronic Pain United States, 2016," *None*, Mar. 2016, doi: <https://doi.org/10.15585/mmwr.rr6501e1>.
- [20] K. S. Ikuta et al., "Global mortality associated with 33 bacterial pathogens in 2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019," Elsevier BV, Nov. 2022, doi: [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(22\)02185-7](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(22)02185-7).
- [21] B. Starfield, L. Shi, and J. Macinko, "Contribution of Primary Care to Health Systems and Health," Wiley, Sep. 2005, doi: <https://doi.org/10.1111/j.1468-0009.2005.00409.x>.
- [22] E. Macaro, S. Curle, J. Pun, J. An, and J. Dearden, "A systematic review of English medium instruction in higher education," Cambridge University Press, Dec. 2017, doi: <https://doi.org/10.1017/s0261444817000350>.
- [23] P. Runeson and M. Hst, "Guidelines for conducting and reporting case study research in software engineering," Springer Science+Business Media, Dec. 2008, doi: <https://doi.org/10.1007/s10664-008-9102-8>.
- [24] P. Williamson et al., "The COMET Handbook: version 1.0," Springer Science+Business Media, Jun. 2017, doi: <https://doi.org/10.1186/s13063-017-1978-4>.
- [25] K. Hamelberg, K. D. Ruyter, W. V. Dolen, and U. Konu, "Finding the Right Voice: How CEO Communication on the RussiaUkraine War Drives Public Engagement and Digital Activism," *Journal of Public Policy & Marketing*, Jan. 2024, doi: 10.1177/07439156241230910.
- [26] Z. Kharaba et al., "Barriers to effective communication in UAE community pharmacies: general public perspectives on enhancing patient-pharmacist interaction and policy development," *Journal of Pharmaceutical Policy and Practice*, Feb. 2025, doi: 10.1080/20523211.2025.2460744.
- [27] J. Rad and G. J. Melendez-Torres, "Critical discourse analysis of social media advertisements for GLP-1 receptor agonist weight loss drugs: implications for public



perceptions and health communication,” BMC Public Health, Sep. 2025, doi: 10.1186/s12889-025-24197-8.

[28] E. Zarei, A. Ghaffari, A. Nikoobar, S. Bastami, and H. Hamdghaddari, “Interaction between physicians and the pharmaceutical industry: A scoping review for developing a *Policy brief*,” Frontiers in Public Health, Jan. 2023, doi: 10.3389/fpubh.2022.1072708.

[29] S. Borg, “Teacher cognition in language teaching: A review of research on what language teachers think, know, believe, and do,” Cambridge University Press, Apr. 2003, doi: <https://doi.org/10.1017/s0261444803001903>.

[30] D. Casey, “ChatGPT in public policy teaching and assessment: An examination of opportunities and challenges,” Australian Journal of Public Administration, May 2024, doi: 10.1111/1467-8500.12647.

[31] M. Fadly, M. I. Sultan, and M. Akbar, “Political Communication Analysis: The West Sulawesi DPRD’s Approach in Absorbing the Aspirations of Constituents in the Constituency,” Communications on Applied Nonlinear Analysis, Feb. 2025, doi: 10.52783/cana.v32.3948.

[32] A. G. Omulo, “Toward an assessment of the relevance of proposed public policy in contemporary African society: A retrospective review of Kenya’s nowdefunct building bridges initiative, with special reference to postelection violence,” Politics & Policy, Sep. 2024, doi: 10.1111/polp.12630.

[33] F. Mesinger et al., “North American Regional Reanalysis,” American Meteorological Society, Mar. 2006, doi: <https://doi.org/10.1175/bams-87-3-343>.

[34] M. L. Markus, “Power, politics, and MIS implementation,” Association for Computing Machinery, Jun. 1983, doi: <https://doi.org/10.1145/358141.358148>.

[35] B. Williams et al., “2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension,” Oxford University Press, Aug. 2018, doi: <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy339>.